LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2023
(LKPJ)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian sehingga laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi capaian dalam tahun 2023.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan kepemerintahan yang baik, Aamiin.

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ……. … i

DAFTAR ISI ... ……..…… ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum ……..... 1

1.2 Struktur Organisasi dan Tufoksi...……..2

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat struktural 6

BAB II. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan…….. 8

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pel. Program,

2.1.2 Kegiatan & Sub Kegiatan 8

2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU……..…..... 19

2.1.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan……..……..20

2.1.5 Analisis kesusaian antara kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 23

2.1.6 Inovasi.....…24

2.1.7 Prestasi dan penghargaan.....24

2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, & Keputusan Bupati yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah.....25

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati TA. 2022 26

BAB III. PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyaraakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki

kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2. STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

II. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub. Bagian Program
2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
3. Sub. Bagian Keuangan.

III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

VII. UPTD

VIII. Jabatan Fungsional;

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

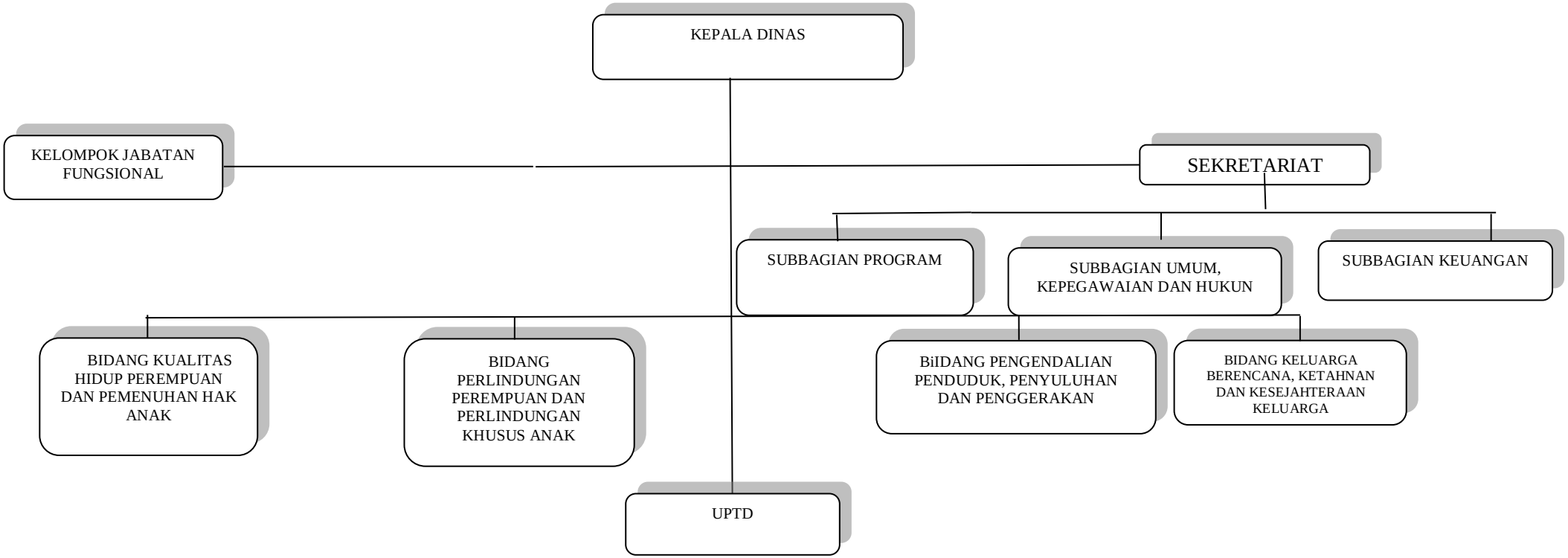

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 103 orang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang, Penyuluh KB Pegawai Pusat sebanyak 17 orang, Pegawai Tidak tetap (PTT) sebanyak 49 orang dan P3K 8 orang.

2. Kualifikasi Menurut Pendidikan

Tabel.Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	1
S2	2
S1	19
D III	0
SMA	8
JUMLAH	**30**

3. Klasifikasi menurut Pangkat dan Golongan

Tabel. Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	12
4.	Penata (III/c)	0
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	6
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	0
9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		**30**

4. Jumlah Pejabat Stuktural dan Fungsional

Tabel.Pejabat Stuktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah	Ket.
Eselon II/a	0 orang	
Eselon II/B	1 orang	
Eselon III/A	1 orang	
Eselon III/B	4 orang	
Eselon IV/A	6 orang	
Eselon IV/B	1 orang	
Fungsional	5 orang	Pegawai Pusat 17 Org
		P3K 8 Orang
Pelaksana	12 orang	
Jumlah	**30**	**25**

DP3AP2KB mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN T.A 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100%	89, 67%			
					8,320,017,180.00	**7,460,457,196.00**			
1	**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**	**RKPD TAHUN 2023**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	100%	**95,37**			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**4,503,199,900.00**	**4,294,587,480.00**			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**100%**	**95,20**			
					3,811,745,900.00	**3,628,942,480.00**			
				Kegiatan :	**100%**	***80,86***			
				Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***28,318,300.00***	***22,897,500.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,086,500.00	15,701,700.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,608,900.00	1,572,900.00			

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,040,000.00	1,040,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	798,000.00	798,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,395,000.00	1,395,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2,389,900.00	2,389,900.00			
				Kegiatan :	100%	**94,92**			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***3,077,088,000.00***	***2,920,671,139.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,042,550,000.00	2,886,498,139.00			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,376,000.00	26,011,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangnan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00			
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,360,000.00	1,360,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,802,000.00	1,802,000.00			
				Kegiatan :	100%	**95,75**			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***9,420,000.00***	***9,020,000.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9,420,000.00	9,020,000.00			
				Kegiatan :	100%	96,12			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	***274,235,200.00***	***263,589,600.00***			

				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,895,000.00	1,895,000.00			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,278,000.00	16,278,000.00			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,624,000.00	7,216,000.00			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,260,400.00	3,092,400.00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000.00	1,800,000.00			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,180,000.00	1,180,000.00			
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	277.350.000	275.883.745			
				Kegiatan :	100%	**89,27**			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	***25,608,000.00***	***22,861,000.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,608,000.00	22,861,000.00			
				Kegiatan :	100%	**98,95**			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***284,736,400.00***	***281,753,862.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,490,000.00	69,896,262.00			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212,246,400.00	211,857,600.00			

				Kegiatan :	100%	**96,27**			
				Pemelilharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	***112,340,000.00***	***108,149,379.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,630,000.00	34,477,084.00			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,270,000.00	50,470,920.00			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,190,000.00	8,955,625.00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	14,250,000.00	14,245,750.00			
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**100%**	**99,75**			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					522,188,800.00	**520,898,200.00**			
				Kegiatan :	100%	94,18			
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	***22,188,800.00***	***20,898,200.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22,188,800.00	20,898,200.00			

				Kegiatan :	100%	100%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**			
				Sub Kegiatan :					
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00			
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**100%**	**90,14**			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					25,000,000.00	**22,536,200.00**			
				Kegiatan :	**100%**	**90,14**			
				Pencegahann Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	***25,000,000.00***	***22,536,200.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhdap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	22,536,200.00			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100%	92,55			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					22,665,200.00	**20,977,200.00**			
				Kegiatan :	100%	92,55			
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	***22,665,200.00***	***20,977,200.00***			

				Sub Kegiatan :					
				Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22,665,200.00	20,977,200.00			
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**100%**	**99,62**			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					16,000,000.00	**15,939,000.00**			
				Kegiatan :					
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16,000,000.00**	**15,939,000.00**			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	16,000,000.00	15,939,000.00			
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100%	83,29			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					83,000,000.00	***69,135,000.00***			
				Kegiatan :	100%	83,29			
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan DUnia Usaha Kewenagan Kabupaten/Kota	***83,000,000.00***	***69,135,000.00***			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33,000,000.00	30,513,000.00			

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	38,622,000.00			
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100%	71,50			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					33.370.000	**30.397.100**			
				Kegiatan :	100%	71,50			
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan PErlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**22,600,000.00**	**16,159,400.00**			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan PErlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,600,000.00	16,159,400.00			
2	**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**	**RKPD 2023**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	100%	82,95%			
					3,816,817,280.00	**3,165,869,716.00**			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	100%	85,71			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					175,400,000.00	**150,338,686.00**			
				Kegiatan :	100%	85,71			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabuapten/Kota	**175,400,000.00**	**150,338,686.00**			

				Sub Kegiatan :					
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34,200,000.00	34,160,000.00			
				Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	77,000,000.00	70,443,686.00			
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelapotran Program KKBPK	64,200,000.00	45,735,000.00			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100%	77,42			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					2,619,917,280.00	**2,028,396,030.00**			
				Kegiatan :	100%	87,28			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**1,015,650,000.00**	**886,461,750.00**			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	80,000,000.00	76,988,000.00			
				Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000.00	148,920,000.00			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	143,000,000.00	142,309,000.00			
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	562,650,000.00	452,016,750.00			
				Pengendalian Program KKBPK	80,000,000.00	66,228,000.00			

				Kegiatan :	100%	100			
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**593,996,280.00**	**593,996,280.00**			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Sarana Pendukkung Operasiona; PKB/PLKB	20,396,280.00	20,396,280.00			
				Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	573,600,000.00	573,600,000.00			
				Kegiatan :	100%	67,37			
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**582,771,000.00**	**392,636,000.00**			
				Sub Kegiatan :					
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke FAsilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45,000,000.00	34,760,000.00			
				Peningkata Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	487,071,000.00	308,168,000.00			
				Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KEsehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25,500,000.00	25,278,000.00			
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	25,200,000.00	24,430,000.00			

				Kegiatan :	100%	36,33			
				Pendayagunaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB	**427,500,000.00**	**155,302,000.00**			
				Sub Kegiatan :					
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9,000,000.00	8,982,000.00			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	418,500,000.00	146,320,000.00			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100%	96,64			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					1,021,500,000.00	**987,135,000.00**			
				Kegiatan :					
				Pelaksnaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	**1,021,500,000.00**	**987,135,000.00**			
				Sub Kegiatan :					
				Pengadaan Sarana Kelompok kegiatann Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360,000,000.00	352,170,000.00			

				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengolala dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK_R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	661,500,000.00	634,965,000.00			

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DP3AP2KB

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Ket.
1	**2**		**3**	**4**	**5=(4/3)*100**	**6**
1	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintah	%	13,74	0,087	0,006	PP
	2. Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta	%	43,72	0,91	0.020	PP
	3. Rasio KDRT	%	2.19	0,003	0,001	PP
	4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	42,85	56,03	1,307	PP
	5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak tindakan kekerasan	100%	0,56	22	39,28	PP & PA
2.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	1. Rata – rata jumlah anak perkeluarga	%	2	1,9	0,95	Dalduk
	2. Rasio akseptor KB Baru	%	47	52,35	1,113	Dalduk
	3. Cakupan Peserta KB Aktif	%	12,113	13,422	110	Dalduk

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN TAHUN 2023 DP3AP2KB

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD	%	25	0,897	0,0358	PP
	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	12	0.12	Perlindungan Anak
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,40	1,56	3,90	PP
	4. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	OPD	28	-	-	Tidak di anggaran
	5. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	OPD	48	38	0,791	PP
	6. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		4	4	100	Perlindungan Anak
	7. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	10	6	0,6	PA
	8. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Orang	12	12	100	PA
	9. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	6	6	100	PA
	10. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Lembaga	10	2	0,2	PA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	11. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Ormas	28	-	-	Tidak ada anggarkan
	12. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	105	-	-	Tidak ada anggarkan
	13. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Ormas	28	-	-	Tidak ada anggaran
	14. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Unit	5	-	-	Tidak ada anggaran
	15. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	-	-	-	Belum ada kebijakan/Perbup
	16. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	-	0,06	-	-	Belum ada lembaga di Kep. Selayar
	17. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	0,40	10	25	PP
2	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. TFR (Angka Kelahiran Total)		2,08	1,94	0,95	Bid. Dalduk
	2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	72,84	65,97	9,05	Bid. Dalduk
	3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,15	12,71	155	Bid. Dalduk

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	4. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		1 Dok	-		Tidak Tersedia
	5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	%	21	≥ 20	0,95	Bid. Dalduk
	6. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	13245	4405	33,25	Bid. Dalduk
	7. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	3.051	2748	90.06	Bid. Dalduk
	8. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	%	12	21	1,75	Bid. Dalduk
	9. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Faskes	17 Faskes	17 Faskes	100%	Bid. Dalduk
	10. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	12.133	3.901	32,20	Bid. Dalduk
	11. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Pokja Kampung KB	88	88	100%	Bid. Dalduk
	12. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	2.643	1.690	63,94	Bid. Dalduk
	13. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	306	80	26,14	Bid. Dalduk
	14. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	10.233	8.655	84,57	Bid. Dalduk

2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DP3AP2KB

No.	UrusanPemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5=4-3**	**6=(4/3)*100**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp. 8.320.017.180,-	Rp. 7.460.457.196,-	Rp. 859.559.984,-	89,67	10			
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Rp. 4.503.199.900,-	Rp. 4.294.587.480,-	Rp. 208.612.420,-	95,36	7	51,58	13	47,59
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 3.816.817.280,-	Rp. 3.165.869.716,-	Rp. 650.947.564,-	82,92	3	38,05	6	35,86

2.1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	GERAKAN SEHATI (Selesaikan Pendidikan, Hasilkan Pendapatan dan Tiba saatnya untuk Menikah)	Meningkatkan Pemahaman anak tentang dampak perkawinan anak dan Pencegahan Kahamilan Usia anak dan pentingnya pendidikan, sehingga bisa berdampak pada penurunan angka perkawinan anak	Menurunnya angka Perkawinan Anak pada Tahun 2022 sebanyak 331 dan Tahun 2023 sebanyak 163.	

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2022		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
2.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2023		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	No. 107/II/TAHUN 2023 Tangal, 02 Februari 2023	SK TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Mendukung Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar	
2	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH , MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	No. 701/XI/TAHUN 2023 Tanggal, 02 Februari 2023	SK PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH , MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan pemenuhan Hak Anak baik dalam Program kegiatan disegala bidang maupun kebijakan – kebijakan yang menunjang pembangunan yang ada di semua perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar	
3	FORUM ANAK DAERAH TANADOANG SILAJARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	No. 125/II/TAHUN 2023 Tanggal, 20 Februari 2023	SK PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TANADOANG SILAJARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Setiap Anak mempunyai Hak Hidup, Tumbuh Kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi	
4	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	No. 286/V/TAHUN 2023 Tanggal, 05 Mei 2023	SK PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5
1.	Agar memenuhi permintaan masyarakat untuk Rumah Perlindungan bagi Korban dan Pendampingan untuk	Pada Tahun 2024 sudah tersedia anggaran untuk Sewa Gedung/ Rumah yang akan dijadikan rumah Aman. Rumah tersebut berlokasi di Kecamatan Benteng. Selain itu, sudah terbentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang beralamat di Jl. Pierre Tendeang.	Terpenuhinya Layanan Konseling Psikologis, Psikososial serta Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan maupun Anak berhadapan Hukum.

BAB III

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen kepemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.

Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun, tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikutkan berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan penyusunan LKPJ ini.

Benteng, 22 Januari 2024

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199402 1 003